

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, 2007, *Pengantar bisnis modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Handoko, H.T, 2016, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- Husnaini, 2001, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana, 2016, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*, Pustaka Setia, bandung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Siagian Sondang, 2000, *P.Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *kamus hukum*, PT Asdi mahasatya, Jakarta.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekarno K, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.

Usman, H, 2013, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Pasal 106 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenkKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2022.

## **C. Sumber Lain**

Agus Suprijanto, 2011, "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume 1, Nomor 2.

- BPOM Padang Sita 1.544 Pcs Kosmetik Ilegal. Di akses melalui <https://sumatra.bisnis.com/read/20220805/534/1563550/bpom-padang-sita-1544-pcs-kosmetik-ilegal> pada tanggal 21 Oktober 2022.
- BBPOM Padang, 2020, *Laporan Tahunan BBPOM tahun 2020* , [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20210810/padang\\_lapta\\_h2020\\_100821.pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20210810/padang_lapta_h2020_100821.pdf) pada tanggal 19 Januari 2023.
- BBPOM Padang, 2020, *Laporan Tahunan BBPOM tahun 2021*, [https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20220915/Laptah\\_2021\\_Padang\\_2022\\_A\\_finish\\_compressed\\_\(1\).pdf](https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20220915/Laptah_2021_Padang_2022_A_finish_compressed_(1).pdf) pada tanggal 19 Januari 2023.
- BPOM Rilis 56 Produk Kosmetik Berbahaya, Inilah Daftar Lengkapnya. Di akses melalui <https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/08/14/bpom-rilis-56-produk-kosmetik-berbahaya-inilah-daftar-lengkapnya> pada tanggal 20 Februari 2023
- Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, 2019, ‘Efektifitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang’, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik(JMIAP), Volume 1, Nomor 4.
- Ayu Mulyani Noor, 2015, “Pengawasan Peredaran Produk Pangan (Makanan Olahan) Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”, JOM FISIP, Volume 2, Nomor 2.
- Baiq Rimala Purnawija, Anne Yuliantini, Winasih Rachmawati, 2021, “Analisis Zat Berbahaya Pada Kosmetik Krim Pemutih dengan Metode AAS dan Spektrofotometri UV-VIS”, Journal Of Pharmacy and Science (JOPS), Volume 5, Nomor 1.
- Doris, 2015, Metode Riset, Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, Yogyakarta.
- Leonardo Cahyo Nugroho, 2020, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Farmasi Terhadap Izin Edar Obat”, Jurnal Juristic, Volume 01, Nomor 02.
- Lina Pangaribuan, 2017, “Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan”, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Volume 15, Nomor 2.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nurhayati, 2009, “Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan”,  
Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Perizinan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Di akses  
melalui <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> pada tanggal 18 oktober  
2022.

Riska Asri Briliani, Diah Safitri & Sudarno, 2016, “Analisis  
Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan  
Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro  
Menggunakan Biplot Komponen Utama.” , *Jurnal Gaussian*,  
Volume 5, Nomor 3.

Satriadi, 2015, *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap  
Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjungpinang*, *Journal  
Of Economic and Economic Education* Vol. 4 No. 2

Wawancara bersama Ibu Fitria selaku PFM Ahli Madya BBPOM  
Padang dibidang Substansi Pemeriksaan pada hari Senin/ 26  
Desember 2022, pukul 14:00 WIB.